

# Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi Kasus Pasar Baru Indramayu)

Oleh:

Deni Agustina<sup>1</sup>, Ilham Setiawan<sup>2</sup>, Diah Nurwitasari<sup>3</sup>

FISIP-Universitas Wiralodra, Indramayu <sup>1,2,3</sup>

Email:

[deniagustina08@gmail.com](mailto:deniagustina08@gmail.com)<sup>1</sup>

[ilham.setiawan@unwir.ac.id](mailto:ilham.setiawan@unwir.ac.id)<sup>2</sup>

[diah.nurwitasari@unwir.ac.id](mailto:diah.nurwitasari@unwir.ac.id)<sup>3</sup>

Received : Februari 19, 2025

Revised : Februari 19, 2025

Accepted : Februari 26, 2025

Available online : Februari 28, 2025

DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.133

**ABSTRAK:** Di Kabupaten Indramayu sendiri yaitu Pasar Baru Indramayu kondisinya hingga saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, kumuh, atap bangunan yang keropos dan rawan ambruk, bocor, banjir ketika hujan karena sistem drainase yang tidak terawat dan banyak kios yang kosong ditinggal pemiliknya karena sepi pembeli.. Tujuan Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini Pemerintah Daerah Indramayu telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung pasar tradisional melalui peraturan dan program-program yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, yang mengatur jarak pembangunan pasar dengan pembangunan fasilitas baru serta meningkatkan kebersihan dan kenyamanan. Namun Pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan anggaran dan tenaga kerja, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta rendahnya kesadaran pedagang terhadap peraturan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, Pasar.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan, dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pemerintah memang memiliki hak untuk memberikan kebijakan yang terbaik untuk mengatur keberadaan antara pasar tradisional dan juga pasar modern. Namun aturan tersebut harus bersifat objektif dan tidak merugikan keduanya, kebijakan yang dapat membuat keduanya berjalan dengan baik untuk pertumbuhan perekonomian. Karena sejatinya pedagang kecil, pedagang besar, pedagang menengah memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha. (Rusham, 2016:154).

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jumlah pasar yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Indramayu kurang lebih terdapat 58 pasar tradisional.

Melihat dari materi diatas, sudah saatnya Pemerintah Daerah Indramayu melakukan upaya untuk melakukan perlindungan, pemberdayaan, penataan, serta pengendalian agar keberadaan pasar baru Indramayu tetap lestari. Pasar ini seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah karena letaknya yang berada di pusat kota. Pasar Indramayu didirikan pada tahun 1995 silam, sudah 29 tahun berdiri namun hingga saat ini belum pernah dilakukan perbaikan dan rehabilitasi.(Sudedi 2022)

Alasan saya memilih melakukan studi kasus di Pasar Baru Indramayu adalah karena hingga saat ini kondisi pasar baru Indramayu masih sangat memprihatinkan, kumuh, atap bangunan yang keropos dan rawan ambruk, bocor, banjir ketika hujan karena sistem drainase yang tidak terawat dan banyak kios yang kosong ditinggal pemiliknya karena sepi pembeli. Pemerintah daerah sudah saatnya melakukan perannya untuk mempertahankan eksistensi pasar baru Indramayu agar tetap ada. Karena di pasar itu banyak masyarakat yang penghasilan utamanya dari berjualan di pasar tersebut. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mempertahankan keberadaan pasar tradisional yaitu dengan cara memperbaiki bangunan fisik dan memperbaiki sistem manajemen pasar. Karena dengan memperbaiki bangunan fisik

pasar tradisional akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi pedagang dan konsumen serta menambah daya tarik pengunjung.

Selain itu keberadaan Pasar Baru Indramayu menawarkan pengalaman berbelanja yang otentik dengan suasana pasar tradisional yang ramai dan penuh warna. Selain sebagai tempat berbelanja, pasar ini juga berfungsi sebagai pusat interaksi sosial bagi penduduk setempat. Peran Ekonomi dan Sosial pasar Baru Indramayu memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dengan memberikan peluang usaha bagi para pedagang dan penyedia barang. Selain itu, pasar ini juga berfungsi sebagai pusat sosial bagi masyarakat untuk bertemu dan berinteraksi. Perlunya engembangan masa depan seperti upaya untuk meningkatkan fasilitas dan kebersihan pasar dapat menjadi fokus utama untuk memastikan Pasar Baru Indramayu tetap relevan dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang.

Tabel 1 Sarana dan Prasarana Pasar Baru Indramayu

<b>Fasilitas/ Sarana Prasana</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Jumlah Kios</b>	<b>670 kios</b>
<b>Jumlah Los</b>	<b>315</b>
<b>Jumlah Pelataran</b>	<b>120</b>
<b>MCK</b>	<b>3 Unit</b>
<b>Tempat Pembuangan Sampah (TPS)</b>	<b>1</b>
<b>Tempat Parkir</b>	<b>Ada</b>

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Konsep Implementasi**

Implementasi kebijakan menurut George C. Edwards dalam (Winarno, 2021:177) Implementasi merupakan salah satu tahap kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika salah satu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu

diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu disisi lain jika kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Sedangkan menurut Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi yaitu apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan yang tujuan dari program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang bertujuan untuk membuat program berjalan. (Winarno, 2021:148).

## 2. Konsep Pasar

Menurut Santoso (2017) definisi pasar ditekankan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Yang pada dasarnya kegiatan perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang harusnya untuk diproduksi serta tidak di distribusikan. Sedangkan untuk para pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. Sukaesih (1994) dalam (Rusham, 2016:156) menyatakan bahwa citra pasar dalam arti fisik telah mengalami banyak perubahan dan peningkatan menjadi hal yang menarik seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi. Menarik atau tidaknya sarana tempat untuk berdagang tersebut baik yang dikelola oleh pengelola pasar atau tempat perdagangan dan tidak kalah pentingnya yang dilakukan atau peranan pedagang itu sendiri. Pengelola hanya menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk keperluan pedagang dan pengunjung. Sedangkan para pedagang perlu memperhatikan kelengkapan barang, penataan barang, kualitas barang, harga barang, kemudahan berbelanja, dan ketepatan ukuran.

Pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi dalam bentuk mall, supermarket, minimarket, departemen store, dan shopping centre, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja serta adanya manajemen yang berada di satu tangan, memiliki modal yang cukup kuat, dan dilengkapi oleh label harga yang sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/11997.

Sedangkan yang dimaksud dengan pasar tradisional dikemukakan oleh Sadilah, dkk (2011) dalam (MRizky 2020) pasar tradisional adalah sebuah tempat terbuka yang terjadi

proses tawar-menawar. Di pasar tradisional ini para pengunjungnya tidak selalu menjadi pembeli karena dia juga bisa menjadi penjual. Pasar Tradisional bisa digolongkan ke dalam 3 bentuk yakni pasar khusus, pasar berkala, dan pasar harian.

### 3. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah pembahasan penelitian dan memperjelas asumsi penelitian, maka peneliti membuat operasional variable berdasarkan teori dari George C. Edward dalam (Winarno, 2021:177) yang mendefinisikan Implementasi kebijakan Implementasi merupakan salah satu tahap kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika salah satu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu disisi lain jika kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Edward membuat empat indikator yang saling berkaitan untuk menjawab persoalan mengenai implementasi diantaranya yaitu:

#### 1) Komunikasi

Karena menurut Edwards persyaratan utama untuk pelaksanaan implementasi kebijakan adalah harus mengetahui apa saja yang akan dilakukan. Tentu saja komunikasi yang diberikan harus bersifat akurat dan dapat dipahami.

#### 2) Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung menjadi tidak efektif. Dengan begitu sumber-sumber dapat menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

#### 3) Kecenderungan-kecenderungan (Sikap Pelaksana)

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi penting bagi pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana kebijakan memiliki respon yang positif terhadap suatu kebijakan tertentu maka hal tersebut merupakan sebuah signal dukungan yang kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan oleh para pembuat rencana awal. Begitupun sebaliknya.

#### 4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering dan bisa secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menurut Natsir (2023:53) bahwa metode deskriptif kualitatif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta atau keadaan serta fenomena yang sedang berlangsung selama dalam melaksanakan penelitian dan menyajikan data dengan secara objektif.

### **PEMBAHASAN**

Hasil temuan penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu). Pembahasan ini berisis data dan fakta yang diperoleh hasil dari penelitian lapangan yang disusun secara sistematis dengan 4 indikator yaitu 1) Komunikasi; 2) Sumber Daya; 3) Kecenderungan- kecendurungan; dan 4) Struktur birokrasi, sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Berdasarkan dari hasil observasi selama di lapangan, pada indikator komunikasi dapat dianalisis, komunikasi yang terjalin antara kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Kepala Pasar serta antar pedagang menunjukkan adanya sistem komunikasi yang cukup baik. Namun perlu ditingkatkan lagi komunikasinya agar keluhan-keluhan para pedagang yanglain dapat teratasi secara merata karena ada beberapa pedagang yang merasa jika kurangnya komunikasi dengan Kepala Pasar sehingga apa yang mereka keluhkan tidak terdengar. Selain itu Kepala Pasar yang memiliki peran sebagai pelaksana kebijaka dalam penerapan kebijakannya sangat memerlukan juga dukungan dari Pemerintah Daerah. Ketua IPP(Ikatan Pedagang Pasar) sangat mengharapkan mengenai perhatian lebih dari Pemerintah Daerah dan tindakan yang tepat untuk memperbaiki kondisi pasar karena tindakan dari pemerintah daerah sangat penting untuk kemajuan pasar sendiri. Apalagi saat Pasar Baru Indramayu ini letaknya di tengah kota sehingga jika Pasar ini dapat berkembang baik lagi maka dapat menjadi pusat perekonomian yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi antar pihak sangat penting untuk kebaikan bersama dan

perhatian pemerintah daerah sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup para pedagang yang mata pencahariannya bergantung di Pasar Baru Indramayu tersebut.

## 2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menganalisis bahwa pada indikator Sumber Daya untuk setiap pelaksanaan kebijakan yang efektif tidak hanya staf jumlah staf yang penting namun juga kualitas dan kecakapan mereka dalam menjalankan tugasnya. Staf yang tidak memiliki keterampilan ataupun kekurangan pengalaman dapat menghambat implementasi kebijakan. Kekosongan jabatan disuatu bidang juga menjadi salah satu permasalahan dalam menerapkan kebijakan, karena jika kekurangan staf yang berpengalaman maka implementasi kebijakan menjadi kurang maksimal. Lalu untuk Pasar Baru Indramayu sendiri dengan pembagian tugas yang jelas namun pelaksanaannya harus ditingkatkan lagi apalagi seperti keamanan dan kebersihan karena di beberapa titik yang ada di Pasar Daerah Indramayu masih ada yang kumuh dengan tumpukan sampah dan juga. Begitupun dari segi keamanan perlu ditingkatkan lagi agar pedagang dan pembeli merasa aman dan nyaman saat berada di area pasar.

## 3. Kecenderungan

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan indikator ketiga yang memiliki konsekuensi penting bagi pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana kebijakan memiliki respon yang positif terhadap suatu kebijakan tertentu maka hal tersebut merupakan sebuah signal dukungan yang kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan oleh para pembuat rencana awal. Pada hasil observasi bahwa terdapat kekosongan jabatan di bidang pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Indramayu hal itu mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan tugas yang efektif, jumlah staf yang terbatas memiliki potensi mengurangi kualitas dan kecepatan pelayanan, serta, menyulitkan pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformasi dalam proses pengangkatan birokrasi agar lebih fokus pada kompetensi dan kapabilitas, bukan hanya pertimbangan politik. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan mengurangi kendala yang dihadapi saat pelaksanaan tugas.

## 4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan pada hasil observasi lapangan bahwa pada indikator Struktur Birokrasi, telah terlaksananya kinerja yang berasaskan SOP (Standar Operasional Variabel) dimana hal tersebut memiliki peran penting dalam memastikan implementasi

dan konsistensi kebijakan serta dapat berguna untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam organisasi. Petugas kebersihan yang melakukan tugasnya yaitu membersihkan dan mengawasi kebersihan 10 blok yang ada di pasar baru ini. Lalu petugas keamanan yang bertugas berjaga di beberapa titik pasar yaitu di pintu masuk dan pintu keluar. Walaupun penerapannya masih kurang maksimal tapi tugas dari mereka sudah cukup membantu para pedagang tinggal bagaimana para pedagangnya juga bersama-sama memiliki kesadaran untuk saling menjaga kebersihan dan kondisi yang kondusif di pasar sehingga para pembeli juga dapat merasa aman dan nyaman ketika berad di lingkungan pasar.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan Pasar Baru Indramayu sangat dipengaruhi oleh empat indikator utama yang sudah diuraikan diatas, yaitu:

1. Komunikasi yang terjalin cukup baik antara Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Kepala Pasar, dan pedagang, meski masih perlu ditingkatkan agar keluhan pedagang dapat ditangani secara merata.
2. Sumber daya manusia yang memadai tidak hanya dilihat dari jumlah staf, tetapi juga keterampilan dan pengalaman mereka, yang penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif, terutama dalam menjaga kebersihan dan keamanan pasar.
3. Kecenderungan positif pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan sangat diperlukan, namun kekosongan jabatan dan terbatasnya staf menjadi penghambat yang perlu diatasi melalui reformasi birokrasi yang berbasis kompetensi.
4. Struktur birokrasi yang berlandaskan SOP telah berjalan cukup baik, meski perlu dukungan kesadaran bersama dari pedagang untuk menciptakan lingkungan pasar yang aman, nyaman, dan kondusif. Dukungan nyata dari pemerintah daerah menjadi kunci penting untuk kemajuan pasar yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

### **SARAN**

1. Pemantauan dan penegakan peraturan harus lebih ditegaskan lagi khususnya dalam penataan dan penggunaan lahan. Pengawasan secara berkala dan tindakan tegas bagi pelanggaran dapat mengurangi masalah pendirian bangunan di area yang tidak sesuai.
2. Rencana Perbaikan yang terperinci dengan langkah-langkah yang jelas, memfokuskan perbaikan pada jalan yang rusak dan fasilitas penting lainnya.

**REFERENSI**

- Devy Pramudiana, Ika. 2017. "Perubahan Perilaku Konsumtif Masyarakat Dari Pasar Tradisional Ke Pasar Modern." *Asketik* 1 (1): 35-43.
- Firnanda, Yulio Astria Yudha, and Lukman Arif. 2022. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22 (2): 1089.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/11997.
- MRizky, Aminudin. 2020. "Paper Knowledge" . *Toward a Media History of Documents*, 12-26.
- Natsir. Luthfi. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima di Kawasan Zona Merah Kota Bandung. *Jurnal ASPIRASI* Vol. 8 (2), 24-31.
- Natsir, L. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh. *Aspirasi*, 9 (2), 151-155.
- Natsir, L. (2019). Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019. *Aspirasi*, 10(1), 19-31.
- Purwanto, Erwan Agus, and Sulistyastuti/ Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono, Prof Dr. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Edited by Sofiya Yustiyani Suryandari. CV, Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2021. *Kebijakan Publik(Teori , Proses, Dan Studi Kasus)*. Edited by Tri Admojo. CAPS (Center Of Academic Publishing Service).